

BOEDIONOMICS

Oleh: Mudrajad Kuncoro*

Sumber: *Gatra* Nomor 28 Beredar Kamis, 21 Mei 2009



Majunya Boediono menjadi calon wakil presiden yang mendampingi SBY menimbulkan kecaman dan kritik tajam dari berbagai pihak. Suara keras berasal dari parpol Islam pendukung SBY. Benarkah Boediono titipan pihak asing dan penganut neoliberal?

Saya langsung teringat buku *Ekonomi Pancasila* yang ditulis oleh Mubyarto dan Boediono pada tahun 1981. Mubyarto dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi UGM pada 1980-an menggemparkan jagat ekonomi politik Indonesia dengan mempopulerkan gagasan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Buku ini menegaskan betapa konsistennya dan getolnya para penulis memperkenalkan dan mempopulerkan sistem ekonomi yang pas dan khas bagi Indonesia.

Di kalangan para pakar terdapat dua cara pandang terhadap SEP. Pertama, *jalur yuridis formal*, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap.

Jalur kedua adalah *jalur orientasi*, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu inilah adalah Emil salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pada dasarnya mereka menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V. Ketiganya berusaha menjabarkan ideologi Pancasila dalam dunia ekonomi dan bisnis Indonesia.

Boediono dalam buku tersebut, terutama bab 10, secara khusus membahas masalah pengendalian ekonomi makro dalam SEP. Boediono menguraikan bagaimana mengatasi corak masalah makro jangka pendek. (inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran) dan mengendalikannya. Pengendalian inflasi harus mengandalkan kebijakan

yang bersifat tidak langsung, seperti pengendalian kredit, peningkatan tingkat bunga, pengekanan pengeluaran pemerintah, dan instrumen *demand management* lainnya. Menurut Boediono, dalam SEP yang mengandalkan sistem desentralisasi dan pentingnya perencanaan, SEP mempunyai *inner strength* untuk mengatasi masalah makro jangka pendek.

Pemikiran yang ditulis Boediono ini ternyata benar-benar diterapkan ketika Pak Boed, begitu ia biasa disapa, dipercaya pemerintah memangku jabatan-jabatan strategis di negeri ini. Ia pernah menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong di era Megawati (2001-2004), Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2008), dan Gubernur Bank Indonesia (April 2008-Mei 2009).

Di tengah kesibukannya, guru besar Fakultas Ekonomi UGM ini masih menyempatkan memberi kuliah tiap hari Sabtu. Waktu saya kuliah S1 di FE UGM, Pak Boed mengajar mata kuliah Kebijakan Ekonomi. Belakangan Pak Boed mengajar mata kuliah Perekonomian Indonesia. Setiap awal semester, pak Boed selalu sms saya dan menanyakan "Apa ada tugas mengajar bagi saya semester ini?". Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, saya harus menanyakan kesediaan semua dosen untuk mengajar mata kuliah tertentu, termasuk Pak Boed. Meski pensiun sejak 2008, Pak Boed masih aktif mengajar dan presensi kehadirannya lebih dari 95%. Semester ini, Pak Boed mengajar mata kuliah Perekonomian Indonesia dan tidak pernah absen mengajar sampai bulan Mei 2009.

Buku-buku Boediono yang populer di kalangan mahasiswa adalah seri sinopsis. Buku seri sinopsis ini, yang terdiri dari Ekonomi Makro, Mikro, Moneter, Internasional, Pertumbuhan Ekonomi, laris kayak kacang goreng karena menerangkan dengan gamblang inti sari teori ekonomi. Bahkan bagi mahasiswa yang hendak maju pendadaran, sudah menjadi tradisi hukumnya wajib membaca buku-buku karya Pak Boed.

Sebagai ekonom, Pak Boed dikenal sebagai teknokrat dan profesional nonpartisan yang "bertangan dingin". Salah satu contohnya adalah keberhasilan masa Megawati dalam menstabilkan kurs rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dilepaskan dari peran Boediono yang saat itu menjabat sebagai menteri keuangan (Menkeu). Bersama dengan *The Dream Team*, yaitu Dorodjatun Kuntjorojakti (Menko Perekonomian), Kwik Kian Gie (Menteri Bappenas), dan Bank Indonesia, ia berhasil menstabilkan kurs rupiah pada kisaran Rp 9000-an per dolar AS, setelah sempat menembus lebih dari Rp 17.000 menjelang kejatuhan Soeharto. Begitu pula dengan suku bunga berada dalam posisi yang cukup baik merangsang kegiatan bisnis, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan. Boediono dinilai mampu membuat situasi ekonomi yang saat itu masih kacau dan "panas" menjadi dingin.

Rasanya tidak mungkin Pak Boed merupakan titipan pihak asing. Pertama, saat baru menjabat Menkeu, langkah pertama yang ia lakukan adalah menyelesaikan *Letter of Intent* dengan IMF (Dana Moneter Internasional), yang telah disepakati sebelumnya serta mempersiapkan pertemuan Paris Club September 2001. Paris Club ini merupakan salah satu

pertemuan penting karena menyangkut anggaran dan penyelesaian utang luar negeri 2002. Setelah itu, ia bersama tim ekonomi Kabinet Gotong-Royong, secara terencana mengakhiri kerjasama dengan IMF pada bulan Desember 2003.

Kedua, rasio total stok utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (DGDP) Indonesia menurun dari 88% tahun 2000 menjadi 31,8% tahun 2009. Boediono berhasil menggalang kerjasama dengan Bank Indonesia dan tim ekonomi lainnya untuk melakukan manajemen utang luar negeri dan stabilisasi ekonomi. Tak heran bila majalah Business Week dari AS, memberi Boediono pengakuan sebagai tokoh yang kompeten di posisinya sebagai menteri keuangan. Berbagai pelaku bisnis menilai Boediono kredibel, *low profile*, tidak banyak bicara, *prudent* dan sangat konservatif

Agak aneh bila ada yang menuduh Boediono penganut neo-liberal. Paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada pentingnya pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah.

Saat deklarasi capres-cawapres minggu lalu, Pak Boed membantah sebagai penganut neoliberalisme, dengan mengatakan "Butuh peran negara, tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pasar bebas. Selalu diperlukan intervensi dengan aturan main yang jelas dan adil, untuk itu perlu lembaga pelaksana yang efektif. Itu yang harus dilakukan negara."

Pernyataan itu sekaligus menepis anggapan banyak pihak yang mengatakan Boediono adalah ekonom dengan paham ekonomi neoliberalis yang tidak peduli dengan ekonomi kerakyatan. Untuk mengatur perekonomian diperlukan lembaga pelaksana yang efektif meski negara tidak boleh banyak campur tangan dalam perekonomian karena akan mematikan aktivitas bisnis.

Mengikuti perjalanan karier, buku, dan pemikiran Boediono, saya berkeyakinan Pak Boed bukan penganut Neoliberal, bahkan sebaliknya antitesis dari Neoliberal. Masalahnya, bila benar bukan Neoliberal, apakah bila terpilih nanti ia bisa tetap konsisten menjalankan buah pemikiran SEP yang kental dengan ideologi ekonomi kerakyatan yang ditulis dan diyakininya sejak tahun 1980an? Boedionomics ditunggu konsistensi dan implementasinya.

*) Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM; Chief Economist PT Recapital Advisor; <http://www.mudrajad.com>